

2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP).



DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemudahan yang Dia berikan kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatalaksana Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Melalui LKIP Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat menambah informasi dan evaluasi secara lengkap terkait pencapaian kinerja di tahun 2021, serta akan menjadi acuan perbaikan kinerja pembangunan di Bidang Koperasi UKM, Perindustrian maupun Perdagangan.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam seluruh upaya mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2021, juga kami membuka ruang masukan yang konstruktif untuk perbaikan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Liwa, Maret 2022

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

TRI UMARYANI, S.P.,M.Si.
NIP. 19751229 199902 2 001



IKHTISAR KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang diberikan kepada Instansi tersebut. Selain itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program dalam rangka mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggung jawaban pemerintah selaku pemegang mandat kepada masyarakat selaku penerima manfaat pembangunan.

Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis 2017 – 2022 yang telah menjadi komitmen bersama seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, merupakan evaluasi kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk menilai sejauh mana peran dan kontribusi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten Lampung Barat serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran dan tujuan kinerja Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2017 – 2022.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan bupati Lampung Barat yakni berupa sasaran strategis dan target indikator kinerja utama (IKU). Perjanjian kinerja tersebut sesuai dengan sasaran strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017 – 2022. Capaian pada indikator kinerja tahun 2021 tersebut ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1
 Capaian Indikator Kinerja Utama
 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung
 Barat
 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Koperasi yang Sehat	Koperasi	23	27	117
2	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	%	10	67.4	674
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	Poin	887,43	961.79	108.37
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	Poin	358,37	400.61	111.78

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/ melampaui target ditunjukkan pada indikator Jumlah Koperasi yang Sehat, dengan capaian kinerja 117 %, pada indikator Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM, dengan capaian kinerja 674%, pada indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar), dengan capaian kinerja 108.37%, pada indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar), dengan capaian kinerja 111.78 %.

Pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai target kinerja yang diperjanjikan, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat memiliki anggaran belanja sebesar Rp.7.463.919.720 dengan realisasi sebesar Rp.7.037.138.158. Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkategori **efisien** dalam menggunakan sumber daya baik sumber daya keuangan dengan rata – rata efisiensi setiap indikator sasaran mencapai 5,78% maupun sumber daya manusia dari kebutuhan pegawai sebanyak 73 orang tersedia hanya 48 orang dengan rincian ASN sejumlah 31 orang dan sisanya 17 orang dari tenaga kontrak dan harian lepas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR KINERJA	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Gambaran Umum.....	2
I.3 Tugas dan Fungsi	3
I.4 Isu Strategis	5
I.5 Landasan Hukum.....	6
I.6 Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Rencana Strategi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2017 – 2022.....	8
II.2 Indikator Kinerja Utama	15
II.3 Perjanjian Kinerja Hasil Review	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	19
III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	21
III.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran ..	23
BAB IV PENUTUP	56

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA

INDIVIDU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2021



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud tanggung jawab dan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi yang ditetapkan dalam tujuan dan sasaran kinerja secara periodik.

Sebagai upaya mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi yang diberi tanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pembangunan di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan kinerja, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja dan peran dinas untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, target capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh level pemerintahan di atasnya, baik pada level Provinsi maupun level Nasional.

Terwujudnya sebuah tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29



Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

I.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan program dan kegiatan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra-OPD disusun oleh OPD sesuai tugas dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan menengah daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017–2022 disusun sebagai acuan kelanjutan pembangunan Kabupaten Lampung Barat 5 (lima) tahun sebelumnya.

Proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian dari proses pembangunan di Provinsi Lampung dan proses Pembangunan Nasional yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan, sehingga memberikan daya



dukung tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik, yang pada hakikatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kesejahteraan dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah setiap OPD perlu melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Perencanaan Strategis 2017 – 2022 yang mengacu pada sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Barat periode 2017 – 2022.

I.3 Tugas dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Tugas OPD Berkaitan dengan urusan wajib maka Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat menangani urusan koperasi sedangkan untuk urusan pilihan menangani urusan perindustrian dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan



Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

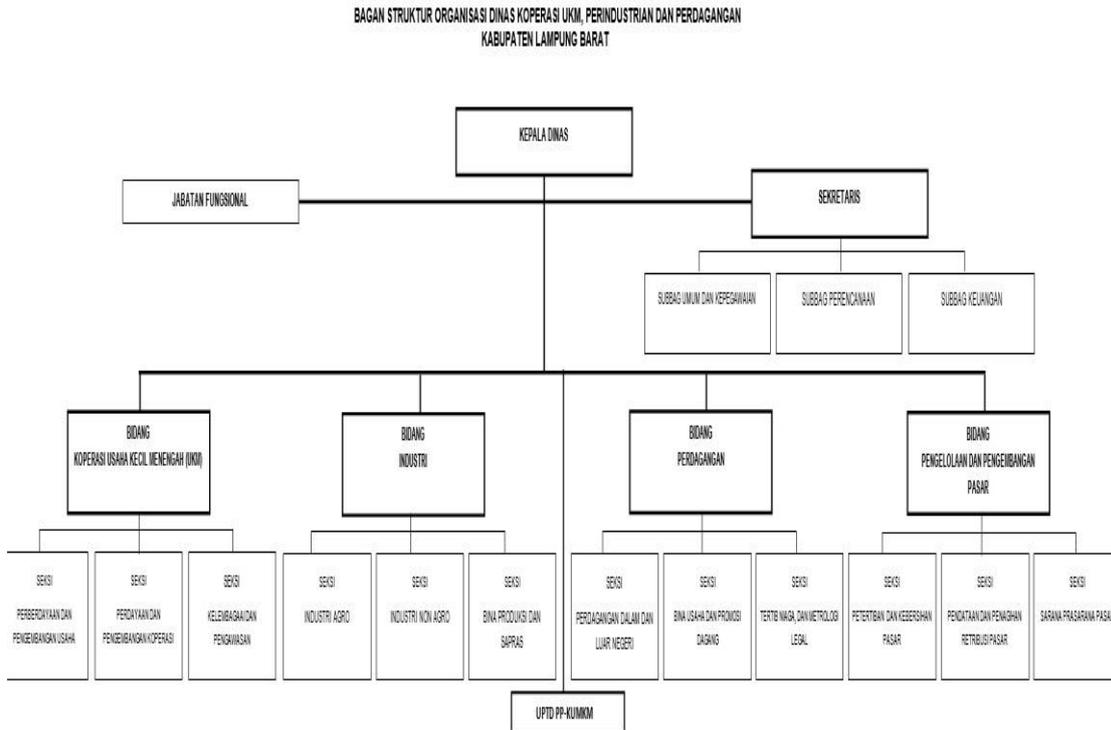
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kedudukan dan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, fungsi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



I.4 Isu Strategis

Penentuan Isu Strategis OPD Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat diatas, selanjutnya permasalahan diatas akan diuraikan dan dikaitkan dengan isu – isu strategis yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Isu – isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya Peningkatan kualitas kompetensi aparatur
- b. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
 - Perlunya peningkatan kualitas dan daya saing Koperasi
 - Perlunya pengembangan usaha UMKM diantaranya masih perlunya upaya peningkatan akses permodalan, pemasaran dan pengembangan produk
- c. Urusan Pilihan Perdagangan

Berbicara masalah perdagangan ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan isu strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yakni :



- Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Lampung Barat yang mengalami kontraksi akibat bencana non alam Pandemi Covid 19
 - Stabilisasi harga pangan pokok dan barang penting serta komoditas pertanian
 - Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi tertib niaga
- d. Urusan Pilihan Perindustrian
- Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
 - Perlunya Peningkatan Pertumbuhan IKM sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Lampung Barat

I.5 Landasan Hukum

LKIP Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ini ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Nomor .900/02/KPTS/III.06/I/2017 tanggal 05 januari 2017 tentang Penetapan



Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

I.6 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis OPD, Indikator Kinerja Utama OPD, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/02/KPTS/III.06/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dibuat sesuai masa jabatan kepala daerah, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mendukung visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dimulai dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD maupun Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil



kesepakatan bersama antara Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder* terkait.

Selanjutnya, Renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Barat periode 2017 – 2022 adalah :**“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”**

Dengan Uraian sebagai berikut :

HEBAT merupakan Kapanjangan dari Harmonis, Elok, Berdaya Saing dan Taqwa. Visi ini bermakna Mengoptimalkan potensi yang ada dan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Misi

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Barat periode 2017 – 2022 adalah :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berdaya saing
3. Meningkatkan Perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya mendukung



pencapaian Misi Ke 3 Bupati Lampung Barat yaitu “Meningkatkan Perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal”.

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian Daerah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Koperasi yang Sehat	3	6	9	12	15
		Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	10	10	10	10	10
2	Meningkatnya	Meningkatnya	Produk	643.153,96	656.081,37	662.642,19	669.268,61	675.961,30



Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Industri dan Perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam juta)						
	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam juta)	247.694,40	250.171,34	252.673,06	255.199,79	257.751,79	

5. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Nomor : 900/07/KPTS/III/I/2017, TANGGAL 5 Januari 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA



1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdayasaing	Jumlah Koperasi yang Sehat	Koperasi	Jumlah Koperasi sehat	Koperasi Sehat sesuai dengan kertas kerja penilaian koperasi sehat	Peraturan Deputi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman Penilaian Koperasi Sehat
2	Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	%		Jumlah UMKM yang bermitra $N - (N - 1) /$ Jumlah UMKM bermitra $N-1 \times 100 \%$	
3	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam juta)	Poin		Data BPS	
4	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam juta)	Poin		Data BPS	

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan sebuah proses bagaimana memberikan perspektif tentang apa yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan



Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Koperasi yang Sehat	12
2	Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	10
3	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam juta)	669.268,61
4	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam juta)	255.199,79

7. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas



Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021, sebagai berikut :

8. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Menambah Sasaran Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Menengah (UMKM)

9. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian Daerah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Koperasi yang Sehat	Koperasi	11	17	22	23	25
	Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam	Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	%	10	10	10	10	10



	perekonomian Daerah								
2	Meningkatnya Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Industri dan Perdagangan	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	Poin	806,05	910,58	870,03	887,43	905,17
		Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	Poin	320,55	364,09	351,35	358,37	365,57

10. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Koperasi yang Sehat	Koperasi	Koperasi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat anggota koperasi, tentu hal tersebut hanya akan terjadi pada koperasi yang usaha maupun kelembagaannya sehat dan aktif.	Koperasi Sehat sesuai dengan kertas kerja penilaian koperasi sehat	Pendataan dan penilaian dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan	
2	Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	%	Permodalan adalah poin penting dalam meningkatkan omset UMKM yang berimbas pada peningkatan	Jumlah UMKM yang bermitra $N - (N - 1) / \text{Jumlah UMKM bermitra } N - 1 \times 100$ %	Dinas Koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan	



Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan

				perekonomian masyarakat			
3	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam juta)	Poin	PDRB adalah sebuah indikator yang bisa menggambarkan pertumbuhan dan kondisi ekonomi sebuah daerah. PDRB sektor perdagangan merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat	Data BPS	Data BPS	
4	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam juta)	Poin	PDRB sektor Industri diharapkan mengalami pertumbuhan sehingga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi	Data BPS	Data BPS	



11. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Koperasi yang Sehat	Koperasi	23
2	Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	%	10
3	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam juta)	Poin	887,43
4	Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam juta)	Poin	358,37



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaksanakan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran



kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun



Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdapat 4 sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- **Sasaran 1** “Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing” terdiri dari 1 indikator : Jumlah Koperasi Sehat
- **Sasaran 2** “Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” terdiri dari 1 indikator : Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM
- **Sasaran 3** “Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan” terdiri dari 1 indikator : Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)
- **Sasaran 4** “Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri” terdiri dari 1 indikator : Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah tersebut. Dengan demikian kinerja utama yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan sebuah instansi. Selain itu, upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Koperasi yang Sehat	Koperasi	23	27	117
2	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	%	10	67.4	674
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	Poin	887,43	961.79	108.37
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	Poin	358,37	400.61	111.78

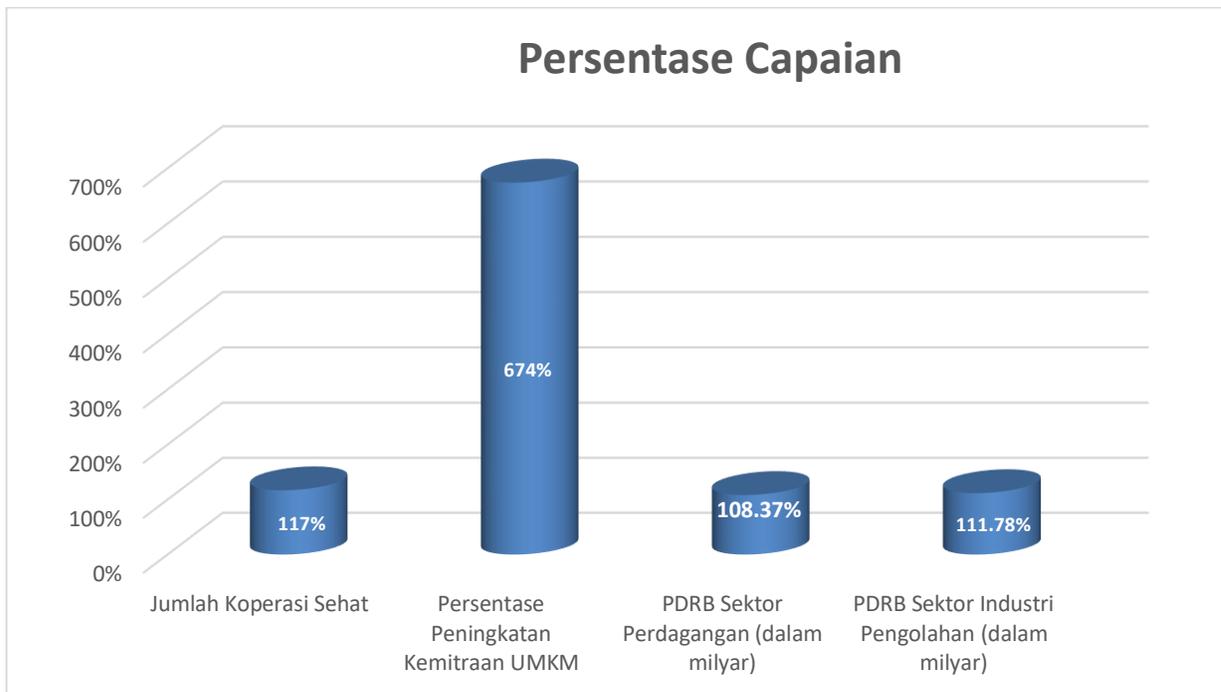
Ket : * angka tahun 2020

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Jumlah Koperasi yang Sehat, dengan capaian kinerja 117 %, pada indikator Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM, dengan capaian kinerja 674%,

selanjutnya untuk capaian indikator kinerja utama yang tidak tercapai adalah pada indikator kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar), dengan capaian kinerja 108.37 %, pada indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar), dengan capaian kinerja 111.78 %.

Gambar 3.1



3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

a. Pengukuran Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dari 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Koperasi yang Sehat	Koperasi	23	27	117
2	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	%	10	67	670
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	Poin	887,43	961.79	108.37
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	Poin	358,37	400.61	111.78

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas diperoleh data dan informasi kinerja dinas pada tabel berikut :



Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun Penjelasan tabel 3.3 bila dikaitkan dengan pencapaian Misi Kepala Daerah yakni Misi Ketiga Meningkatkan Perekonomian yang Berorientasi Pada Agrobisnis dan Agrowisata Berbasis Sumber Daya Lokal bisa dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 3	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00



Dari 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 3	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	4	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

b. Evaluasi Sasaran Strategis

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- 4) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- 5) kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan
Target Renstra Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5			6	7
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Koperasi Sehat	22	23	27	117	25	108
2	Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	67%	10%	67.4%	674	50%	465
3	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (milyar)	870,03	887,43	961.79	108.37	905,17	106.25
4	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	377.07	358,37	400.61	111.78	365,57	109.58



Tabel diatas menggambarkan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran kinerja pada tahun 2019 dan dibandingkan dengan capaian target jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022.

4. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi :

Keberhasilan/kegagalan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam pencapaian kinerja tahun 2021 ditunjukkan dengan tercapainya sebagian target-target indikator yang telah ditetapkan dan belum sepenuhnya tercapai beberapa target kinerja, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.6. Selanjutnya berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap sasaran :

Sasaran Pertama Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator jumlah koperasi yang sehat dari taget yang sudah ditentukan 23 koperasi terealisasi 27 koperasi dengan tingkat capaian 117%. Hal ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja koperasi yang sehat pada sasaran pertama sudah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan ada peningkatan kualitas dan daya saing koperasi di Kabupaten Lampung Barat.

Sasaran kedua yakni Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM. Berdasarkan data capaian, sasaran kedua Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2021 telah tercapai bahkan capaiannya melebihi target kinerja yang diperjanjikan yakni telah terealisasi 67.4% dari target 10% dengan tingkat realisasi 674%.

Sasaran Ketiga yaitu Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan dengan dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar). Berdasarkan data evaluasi kinerja yang bersumber dari BPS Kabupaten Lampung Barat, PDRB Sektor Perdagangan tahun 2021 tercapai 108.37% dari target 887,43 milyar rupiah terealisasi sebesar 961.79. Adapun analisa penyebab keberhasilan pencapaian kinerja akan diuraikan pada sub pembahasan berikutnya.

Sasaran keempat yaitu Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri dengan dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar). Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Lampung Barat nilai PDRB Sektor Industri



Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah sebesar 400.61 milyar rupiah atau tercapai 117.78% dari target kinerja yang diperjanjikan. PDRB Sektor industri ini merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian di sebuah wilayah, untuk itu ada banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhannya, yang akan diuraikan dalam sub bab penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan beberapa indikator Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dari sasaran pertama dan kedua adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Koperindag dan seluruh stakeholders di Kabupaten Lampung Barat, yang dapat bersinergi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai evaluasi. Adapun dua sasaran yang belum tercapai merupakan sebuah kondisi yang tidak bisa dihindari dalam kondisi pasca bencana non alam pandemi covid 19 yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan berdampak pada ekonomi daerah, yakni terjadi kontraksi atau penurunan capaian PDRB baik sektor perdagangan maupun industri.

5. Analisis Capaian Sasaran Strategis

a. Sasaran 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing

Sasaran 1
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Koperasi yang Sehat	Koperasi	22	22	100	23	27	117



Sasaran Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing dapat dilihat dari 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah Koperasi yang Sehat" adalah sebesar 27 koperasi dari target sebesar 23 koperasi yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 117 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah Koperasi yang Sehat" tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 244.4 % menjadi 117%

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 pelaksanaan renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah Koperasi yang Sehat" tahun 2021 adalah sebesar 117. %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan maka capaian kinerjanya mencapai 108 %.

Analisa sasaran :

1) Penghitungan Sasaran 1

Penghitungan capaian kinerja untuk sasaran ke 1 yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut :

(a) Indikator sasaran Jumlah Koperasi yang Sehat. Indikator tersebut diukur dengan formulasi sebagai berikut :

Koperasi Sehat sesuai dengan kertas kerja penilaian koperasi sehat berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan pencapaian untuk Indikator sasaran sebagai berikut :

Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2021 sebanyak 27 Koperasi yang merupakan bagian dari 53 unit Koperasi yang Aktif. Jumlah Koperasi pada tahun 2021 adalah 165 unit koperasi, terdiri dari koperasi aktif 53 unit, koperasi yang diajukan pembubaran 74 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 38 unit. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.8

Data Dukung Capaian Indikator sasaran

No	LOKASI KOPERASI	DALAM PROSES PEMBUBARAN	AKTIF	TIDAK AKTIF	BELUM RAT	BARU	SEHAT
1	KEC.BALIK BUKIT	23	21	8	1	1	12
2	KEC.SUKAU	3	2	1	1	0	0
3	KEC.LUMBOK SEMINUNG	3	1	1	0	0	0
4	KEC.BATU BRAK	4	1	2	0	0	0
5	KEC.BELALAU	3	2	0	0	0	1
6	KEC.BATU KETULIS	2	4	2	0	0	2
7	KEC.PAGAR DEWA	3	2	1	1	0	1
8	KEC.SEKINCAU	4	5	2	1	0	4
9	KEC.WAY TENONG	14	2	8	8	0	1
10	KEC.AIR HITAM	3	3	4	1	0	1
11	KEC.SUMBER JAYA	8	2	4	2	0	2
12	KEC.KEBUN TEBU	1	3	2	1	1	1
13	KEC.GEDUNG SURIAN	1	1	1	0	0	1
14	KEC.SUOH	2	1	1	0	0	1
15	KEC.BANDAR NEGERI SUOH	0	0	1	1	0	0
	JUMLAH TOTAL =165 KOP	74	50	38	17	2	27

Dari tabel di atas dapat diketahui pencapaian untuk indikator ke 1 yaitu jumlah Koperasi yang sehat dari target 23 Koperasi terealisasi 27 Koperasi.

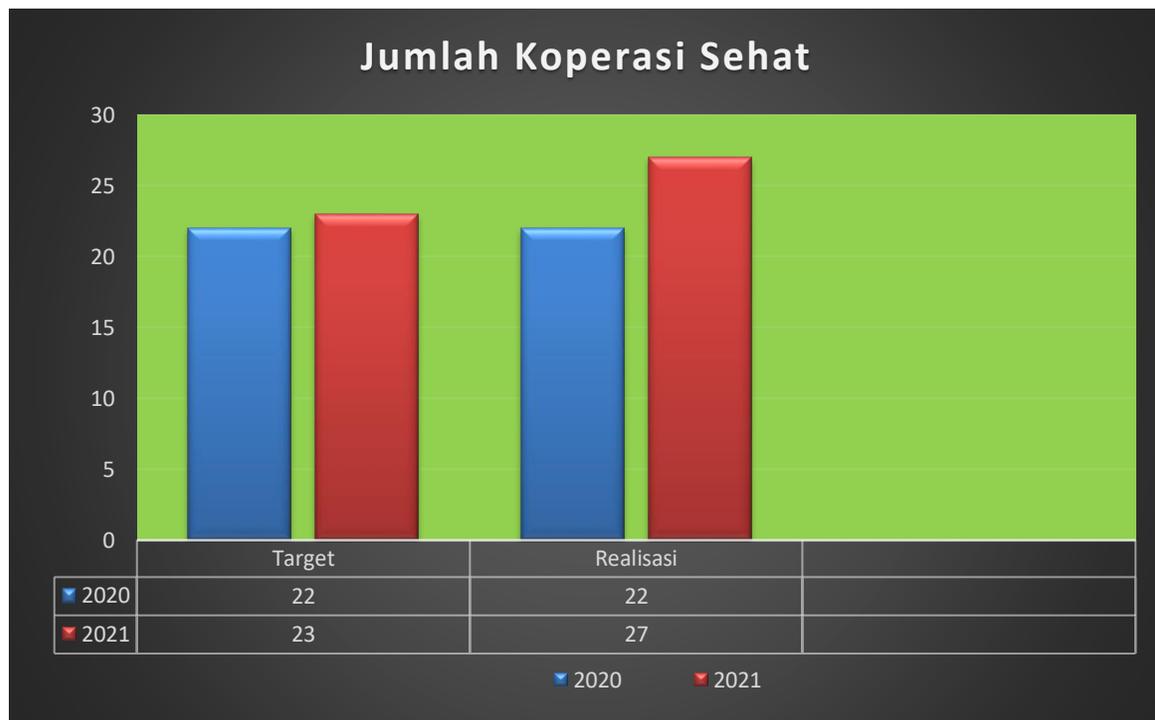
2) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Koperasi Sehat	%	22	22	100	23	27	117

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2021 lebih tinggi dari tingkat capaian tahun sebelumnya dengan kenaikan capaian indikator sebesar 17% dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik berikut:



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Realisasi %		
Jumlah Koperasi Sehat	22	23	27	117	25	108

Berdasarkan Tabel 3.10 terlihat bahwa pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas dan berdaya saing **telah melebihi** target tahun akhir Renstra (2022), dimana terlihat persentase capaian kinerja tahun 2021 sudah melebihi target tahun 2022 yaitu sudah mencapai lebih dari 25 Koperasi sehat dengan tingkat capaian kinerja renstra mencapai 108%.

Tabel 3.11

Program yang mendukung sasaran 1

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN CAPAIAN	EFISIENSI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.732.918.920,-	Rp.3.487.667.448-	93.43%.	6,57 %
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.24.418.900,-	Rp.23.554.412,-	96.46%	3.54%
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.38.291.100,-	Rp.35.902.850,-	93.76%	6.24%



Dari tabel diatas realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. Rp. 3.547.124.710,- dari anggaran sebesar Rp.3.795.628.920,- terealisasi 93.45%, bila dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 117% , maka terjadi efisiensi dan efektifitas kinerja dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 6.55%. Selanjutnya dalam pencapaian kinerjanya, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tidak bisa bekerja sendiri, tapi juga bergantung terhadap kinerja dan program instansi lain, baik internal Pemerintah maupun eksternal. Pihak internal Pemerintah adalah Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung yang dalam salah satu programnya menyediakan layanan fasilitasi pendirian koperasi ke Notaris dengan membebaskan biaya notaris bagi koperasi baru. Adapun pihak eksternal yakni pihak Notaris yang ditunjuk sebagai notaris akta pendirian koperasi. Kedua hal ini sangat menunjang pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Lampung Barat.

c. Faktor penunjang indikator keberhasilan Jumlah Koperasi Sehat:

Capaian kinerja yang melampaui target sebagaimana diuraikan diatas dicapai karena beberapa faktor, antara lain :

- a) Adanya dukungan pendanaan yang cukup dari APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan;
- b) Optimalnya kinerja aparatur pembina dan pengawas koperasi dalam menjalankan pembinaan terhadap sumber daya koperasi, selain itu optimalnya kinerja petugas pendamping lapangan bagi koperasi juga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran
- c) Faktor eksternal juga mempengaruhi capaian koperasi, kebijakan pemerintah pusat terkait tagline “*untung bareng koperasi*” serta aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga kesadaran masyarakat tentang urgensi mengelola usaha koperasi menjadi pendukung ketercapaian kinerja.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sasaran 2	
Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	%	10 %	67.7%	677	10%	67.4%	674

Sasaran Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM. Adapun capaian kinerja nyata sasaran ini pada tahun 2021 adalah sebesar 67,4% dari 10% target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 674%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian kinerja mengalami penurunan 0.03 poin saja dari sebelumnya tercapai 67,7% pada tahun 2020 menjadi tercapai sebesar 67,4% pada tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan periode ke-4 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM" tahun ini adalah sebesar 67.4 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan maka capaian kerjanya mencapai 464%.

Analisa sasaran**1) Penghitungan Sasaran 2**

Penghitungan capaian kinerja untuk sasaran ke 2 Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM menggunakan formula sebagai berikut:

- Indikator sasaran Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM. Indikator tersebut diukur dengan formulasi sebagai berikut



$$\frac{\text{Jumlah UMKM yang bermitra tahun N - (N-1)}}{\text{Jumlah UMKM yang bermitra (N-1)}} \times 100\%$$

$$\frac{591 - 353}{353} \times 100\% = 67.4\%$$

Jumlah UMKM tahun 2021 yang memanfaatkan jasa keuangan perbankan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang terdata dalam Aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) Sebanyak 586 Debitur dan jumlah UMKM yang memanfaatkan permodalan melalui UPTD PP KUMKM sebanyak 5 mitra.

Sementara Jumlah UMKM tahun 2020 yang memanfaatkan jasa keuangan perbankan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang terdata dalam aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) Sebanyak 301 Debitur dan jumlah UMKM yang memanfaatkan permodalan melalui UPTD PP KUKM sebanyak 16 mitra

Tabel. 3.13

Data Dukung Capaian Indikator sasaran

NO	URAIAN	2020	2021
1	Aplikasi SIKP	337	586
2	UPT PP KUMKM	16	5

Dari tabel diatas terlihat terdapat kenaikan Debitur pada Perbankan karena mudahnya persyaratan serta besarnya alokasi dana KUR yang dikucurkan Pemerintah Pusat lewat bank yang ditunjuk. Akan tetapi disatu sisi terdapat penurunan mitra di UPT PP KUMKM, hal ini disebabkan oleh menurunnya minat pelaku usaha Koperasi dan UMKM dan mengalihkan akses permodalannya ke Kredit Usaha Rakyat. Lebih rinci akan dijelaskan pada sub bab analisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

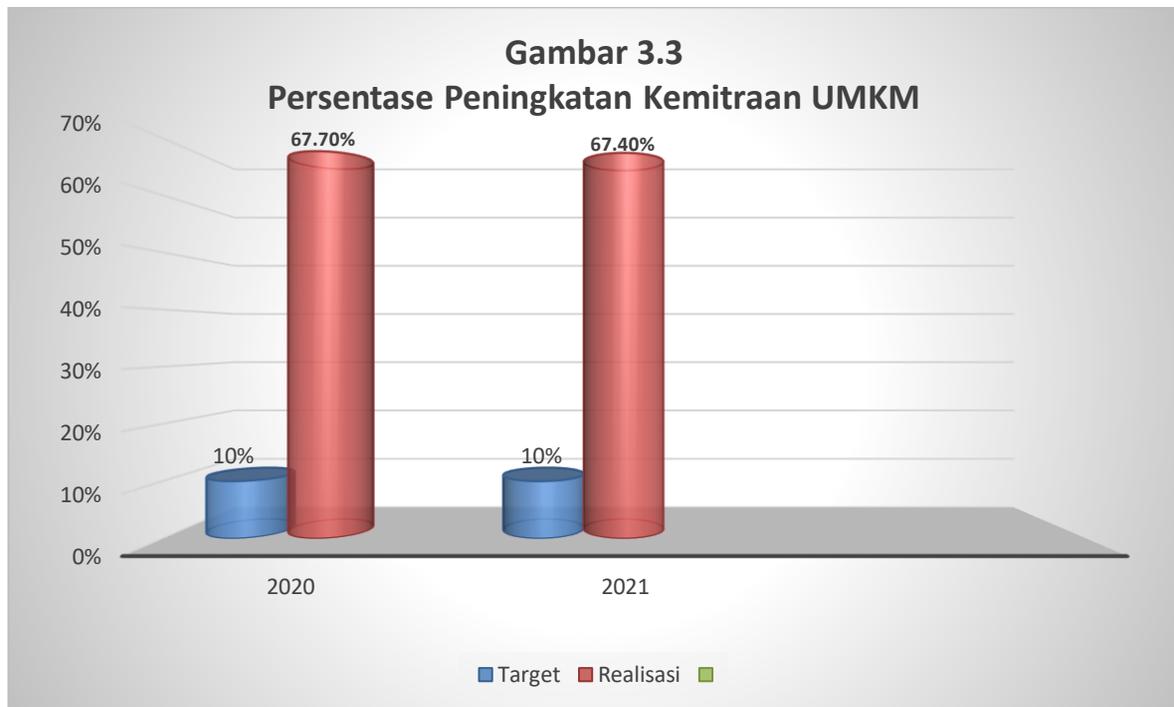
2) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	%	10 %	67.7%	677	10%	67.4%	674

Berdasarkan Tabel 3.14 terlihat bahwa realisasi pada tahun 2021 pencapaian kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 3%. Meskipun demikian, capaian kinerja yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya tersebut tidak terlalu berdampak pada keberhasilan kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengingat capaian kinerja pada sasaran kedua ini mengalami over target sebesar 674%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya bisa dilihat pada gambar berikut :



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Realisasi %		
Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	67.7%	10%	67.4%	67.4	40%	465

Berdasarkan Tabel 3.15 terlihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran telah jauh melebihi target tahun akhir Renstra (2022), yakni dari target kondisi akhir renstra 40% telah tercapai 465%.

Tabel 3.16

Program yang mendukung sasaran 2

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN CAPAIAN	EFISIENSI
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.277.697.300,-	Rp.274.639.599,-	98.90%	1.10%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 274.639.599,- dari anggaran sebesar Rp. 277.697.300,- terealisasi 98.90% bila dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 674%. Selain itu pada tahun 2021 terjadi refocusing anggaran sebesar Rp.27.319.000,- sehingga terjadi pengurangan anggaran sebesar 89,5% sehingga terjadi efisiensi sebesar 10.05%.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan terdapat *crosscutting* kinerja dengan instansi lain, dalam hal ini bagian perekonomian



Setdakab Lampung Barat selaku penanggung jawab Sistem Informasi Kredit Program aplikasi yang menunjang pengajuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga memudahkan Koperasi dan UMKM mendapat akses pembiayaan.

4) Faktor penunjang indikator keberhasilan Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM:

Keberhasilan kinerja yang telah dipaparkan pada uraian diatas tidak terlepas dari faktor – faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- a) Sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat yang massif kepada pelaku usaha dalam setiap kesempatan.
- b) Sinergitas optimalisasi program KUR yang dilakukan dengan semua stakeholder terkait
- c) Optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Kredit Program.

c. Sasaran 3 Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan

Sasaran 3
Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.17

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	Poin	870.03	870.03	100	887,43	961.79	108.37

Sasaran Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan terdiri dari 1 indikator yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan. Adapun capaian kinerja sasaran ini adalah 961.79 milyar rupiah tercapai 108.37% dari target kinerja 887,43 milyar rupiah.



Analisa sasaran :

1) Penghitungan Sasaran 3

Penghitungan capaian kinerja untuk sasaran ke 3 Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan didapat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. PDRB merupakan sebuah nilai yang menggambarkan besaran nilai tambah ekonomi yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. PDRB Sektor Perdagangan dalam hal ini perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 12.85% PDRB Kabupaten Lampung Barat. Peran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai OPD yang diberi tanggung jawab menyusun kebijakan terkait peningkatan PDRB sektor Perdagangan melaksanakan berbagai macam kebijakan, program maupun kegiatan yang diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tersebut.

Kebijakan tersebut antara lain adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting ditingkat pasar rakyat, perlindungan konsumen melalui program tertib niaga serta mendorong dan memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan UMKM. Berikut beberapa data pendukung pencapaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam tabel 3.18

Tabel. 3.18
Data Dukung Capaian Indikator sasaran

NO	URAIAN	REALISASI	
		2020	2021
1	JUMLAH PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2 UNIT	3 UNIT
2	LAJU PERTUMBUHAN HARGA RATA - RATA	<0,21%	0,142%
3	JUMLAH PRODUK UMKM TERFASILITASI PEMASARAN	0 PRODUK	27 PRODUK
4	PERSENTASE ALAT UTTP TERTERA SAH	1,8%	2,7%

ANALISA DATA DUKUNG :

1. JUMLAH PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Formulasi : Jumlah Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan yang dilakukan revitalisasi



Pada tahun 2021 ada 3 unit pasar rakyat yang dilakukan revitalisasi, berupa rehab kios dan los pasar pemda maupun penyusunan perencanaan revitalisasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan Los Ikan, daging, ayam di pasar pagar dewa kecamatan sukau dengan luas 76,16m²
- b. Rehabilitasi area parkir pasar simpang sari kecamatan sumber jaya dengan luas 579,24m²
- c. Jasa Konsultasi Perencanaan pembangunan berupa pemeriksaan soil test pasar seblat kecamatan sukau dan pasar purajaya kecamatan sumber jaya.

2. LAJU PERTUMBUHAN HARGA RATA - RATA

Formulasi : $\text{Harga bahan Pokok dan Barang Penting Bulan } n - (n-1) / n-1 \times 100\%$

Harga bahan pokok dan barang penting yang dianalisis fluktuasinya adalah harga ditingkat pasar rakyat/tradisional, yang merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menstabilkan harga dengan harapan konsumsi masyarakat tetap naik sehingga menaikkan nilai tambah dari transaksi perdagangan di Kabupaten Lampung Barat. Data capaian diatas menunjukkan bahwa fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok dari tahun sebelumnya hingga tahun 2021 tidak terlalu besar dan mencapai target kinerja yakni dibawah 5%.

3. JUMLAH PRODUK UMKM TERFASILITASI PEMASARAN

Formulasi : Jumlah jenis produk Koperasi dan UMKM yang difasilitasi pemasarannya selama 1 tahun

Nilai tambah PDRB Sektor Perdagangan sangat ditunjang oleh perputaran penjualan produk baik dari sektor perdagangan besar maupun eceran. Berdasarkan data, pelaku usaha di Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh pelaku usaha mikro, sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan fasilitas perluasan pemasaran produk UMKM melalui event promosi, yang diharapkan mampu mendorong kenaikan penjualan dan omset pelaku usaha perdagangan mikro. Pada tahun 2020 kegiatan fasilitasi pemasaran tersebut tidak dilakukan karena terdampak refocusing anggaran,



sementara di tahun 2021 terdapat 27 jenis produk UMKM yang difasilitasi.

4. PERSENTASE ALAT UTTP TERTERA SAH

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Alat UTTP Tertera sah}}{\text{Jumlah Total Alat UTTP}} \times 100\%$

Perlindungan konsumen merupakan hal strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan selaku OPD yang diberi mandat melaksanakan urusan perdagangan. Kepercayaan konsumen akan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi diwilayah Kabupaten Lampung Barat ataukah tidak, oleh karenanya Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program perlindungan konsumen berupa pelaksanaan Tera dan Tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Pada tahun 2021 2,7% potensi UTTP telah dilakukan Tera dan Tera Ulang, mengalami kenaikan 50% dari tahun sebelumnya.

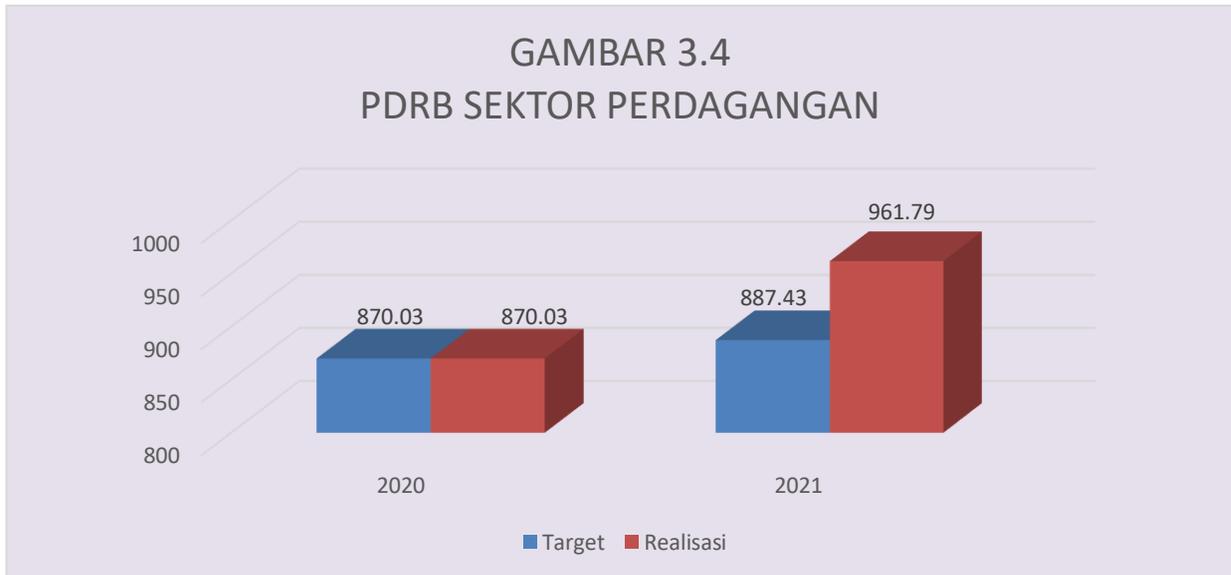
2) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	Poin	870.03	870.03	100	887,43	961.79	108.37

Berdasarkan Tabel 3.19 terlihat bahwa realisasi pada tahun 2021 indikator kinerja 1 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 8.37%. Untuk melihat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya bisa dilihat pada gambar 3.4 berikut :



3) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja Provinsi

Pencapaian Kinerja PDRB Sektor Perdagangan dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Capaian Provinsi

Indikator	Target Kinerja	Capaian kinerja	Kinerja Provinsi Lampung
Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	887,43	961.79	43.510*

*sumber : website BPS Provinsi Lampung ; february 2021

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Realisasi %		
Produk Domestik Bruto (PDRB)	870.03	887,43	961.79	108.37	905,17	106.25



Sektor Perdagangan (dalam milyar)					
---	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 3.20 terlihat bahwa indikator kinerja sudah tercapai 106.25% dari target renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat.

Tabel 3.22
Program yang mendukung sasaran 3

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN CAPAIAN	EFISIENSI
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.1.699.079.500	Rp.1.537.463.199	99.17%	0.83%
2	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.444.102.000	Rp.425.037.099	95.71	4.29%
3	Program Pengembangan Ekspor	Rp.158.774.500	Rp.24.800.500	15.62%	84,38%
JUMLAH		Rp.2.301.956.000	Rp.1.987.300.798	86.33%	13.67%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 1.987.300.798,- dari anggaran sebesar Rp. 2.301.956.000,- terealisasi 86.33% bila dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 108.37%, maka terjadi efisiensi dan efektifitas kinerja dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 13.67%.

Dalam hal pencapaian kinerja, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga sangat tergantung dengan *crosscutting* program dari instansi terkait, diantaranya Dinas Lingkup Deptan dan anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Barat, dalam hal pelaksanaan pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang penting, serta pemantauan ketersediaan sembako dan komoditas pertanian. Dalam hal



pemasaran produk UMKM Dinas Koperindag juga melaksanakan kerjasama pemasaran dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung Barat, khususnya UMKM kerajinan.

5) Faktor penunjang pencapaian Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan

Pencapaian indikator kinerja sasaran ke 3 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sudah mencapai diatas 100% dengan tingkat pencapaian 108.37%. Pencapaian ini dipengaruhi faktor – faktor berikut :

- a. PDRB sektor perdagangan adalah perhitungan dan analisis ekonomi secara makro yang dipengaruhi banyak faktor, dan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional dan skala wilayah provinsi dalam hal ini provinsi lampung, yang bukan hanya dari sisi pengeluaran masyarakat namun juga sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat secara umum
- b. Tumbuhnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Unit (SPBU) di Kabupaten Lampung Barat. Tahun 2021 tercatat 17 unit SPBU baru baik pertamina maupun pertashop yang beroperasi di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini menaikkan transaksi perdagangan dan menaikkan angka PDRB Sektor Perdagangan.
- c. Kebijakan Penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi 0% ditahun 2021 juga menjadi faktor penunjang naiknya transaksi sektor perdagangan yang mendukung kenaikan PDRB sektor perdagangan
- d. Upaya pemulihan ekonomi daerah yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdampak pada bergeliatnya kembali kegiatan ekonomi masyarakat, menaikkan konsumsi tingkat rumah tangga, sehingga sektor perdagangan yang pada tahun 2020 terkena dampak negatif pandemi covid 19 saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya.

d. Sasaran 4 Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri

Sasaran 4
Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri



Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.23

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	Poin	351,35	377.07	107.32	358,37	400.61	111.78

Sasaran Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri dapat dilihat dari capaian indikator yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar), dengan realisasi sebesar 400.61 milyar rupiah, atau terealisasi 111.78% dari target kinerja

Capaian kinerja nyata indikator "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)" tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 4.46%.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 periode renstra, capaian kinerja indikator "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam juta)" tahun ini adalah sebesar 111.78%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan maka capaian kerjanya mencapai 109.58 %.

Analisa sasaran :

1) Penghitungan Sasaran 4

Penghitungan capaian kinerja untuk sasaran ke 4 meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor industri didapat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. PDRB merupakan sebuah nilai yang menggambarkan besaran nilai tambah ekonomi yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. PDRB Sektor industri menyumbang 5.35% PDRB Kabupaten Lampung Barat (Lampung Barat Dalam Angka ; 2020). Peran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai OPD yang diberi tanggung jawab menyusun kebijakan terkait peningkatan PDRB industri melaksanakan berbagai macam kebijakan, program maupun kegiatan yang diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tersebut.



Kebijakan tersebut antara lain adalah upaya pelaksanaan kebijakan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) berupa pengembangan sentra IKM, Peningkatan kapasitas produksi IKM, fasilitasi pemasaran produk dan juga layanan kemasan produk. Seluruh kegiatan tersebut untuk mendukung pertumbuhan IKM di Kabupaten Lampung Barat. Berikut beberapa data pendukung pencapaian kinerja sasaran 3 disajikan dalam tabel 3.23

Tabel. 3.24

Data Dukung Capaian Indikator sasaran
Data IKM Perjenis Usaha Tahun 2020-2021

NO	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	
		2020	2021
1	INDUSTRI OLAHAN PANGAN	357	382
2	INDUSTRI TEKSTIL	24	25
3	INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU	207	83
4	INDUSTRI KIMIA FARMASI	2	2
5	INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU	83	88
6	INDUSTRI PENGOLAHAN KARET DAN PLASTIK	18	18
7	INDUSTRI GALIAN BUKAN LOGAM	28	28
8	INDUSTRI PENGOLAHAN BESI / LOGAM	13	13
9	INDUSTRI PERALATAN PERTANIAN (ALSINTAN)	9	9
10	INDUSTRI JASA	122	122
11	INDUSTRI LAINNYA	71	71
12	INDUSTRI ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	63	63
Jumlah		790	823

Analisa data dukung :

$$\frac{\text{Formulasi : (Jumlah IKM tahun n) - (Jumlah IKM tahun n-1) x 100\%}{\text{Jumlah IKM n-1}}$$

Dari tabel diatas didapat perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{823 - 790}{790} \times 100\%$$

Pertumbuhan IKM Lampung Barat Tahun 2021 **sebesar 4,1%**

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.25

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Capaian Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	Poin	351,35	377.07	107.32	358,37	400.61	111.78

Berdasarkan Tabel 3.24 terlihat bahwa realisasi pada tahun 2021 indikator kinerja 1 mengalami kenaikan sebesar 4.46% dari tahun sebelumnya. Secara lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik berikut:



3). Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja Provinsi

Pencapaian Kinerja PDRB Sektor Industri dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Capaian Provinsi

Indikator	Target Kinerja	Capaian kinerja	Kinerja Provinsi Lampung
Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri Pengolahan (dalam milyar)	358,37	400.61	73.095*

*sumber : website BPS Provinsi Lampung ; february 2021

4). Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.27

Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Realisasi %		
Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	351,35	358,37	400.61	117.38	365,57	109.58

Berdasarkan Tabel 3.25 terlihat bahwa capaian indikator kinerja tahun 2021 sudah mencapai 109.58% dari kondisi akhir yang diinginkan dalam jangka menengah atau renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat.

Tabel 3.28
Program yang mendukung sasaran 1

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN CAPAIAN	EFISIENSI
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Rp.1.691.514.000,-	Rp.1675.634.650,-	99.06%	0.84%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.1.691.514.000,- dari anggaran sebesar Rp.1675.634.650,- terealisasi 99.06% bila dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 117.38%, maka efisiensi terhadap penggunaan anggaran sudah terkategori efisien, karena penggunaan anggaran tidak sampai 100% sementara capaian kinerja diatas 100%.

5) Faktor penunjang indikator keberhasilan Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri

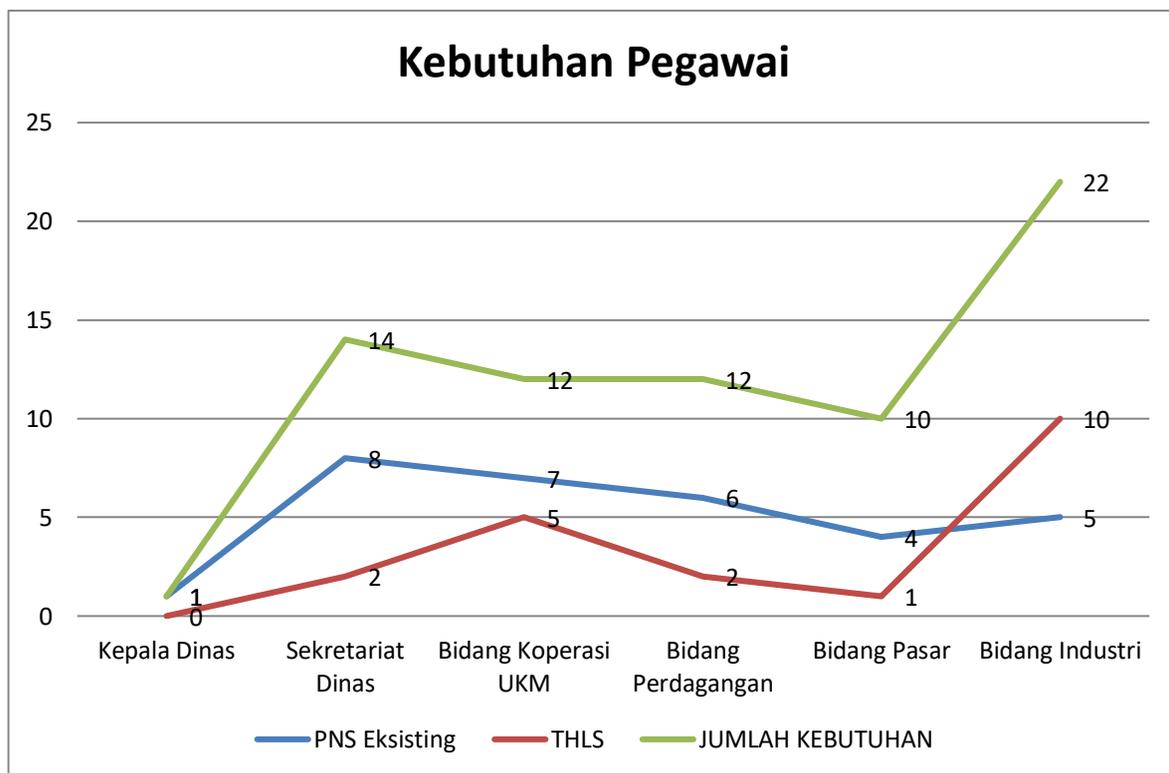
Pencapaian indikator kinerja sasaran ke 4 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat *over target* sebesar 117.38% Pencapaian Kinerja tersebut dipengaruhi faktor – faktor berikut :

- a. PDRB sektor industri adalah perhitungan dan analisis ekonomi secara makro yang dipengaruhi banyak faktor, dan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional dan skala wilayah provinsi dalam hal ini provinsi lampung, diantaranya penjualan dan omset pelaku usaha sektor industri, dalam hal ini sektor industri kecil menengah
- b. Pertumbuhan IKM sebesar 4,1% pada tahun 2021 ikut berperan menaikkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat. Pertumbuhan IKM disertai dengan peningkatan produktivitas dan penjualan produk IKM yang menjadi faktor penunjang utama penghitungan nilai tambah yang menjadi salah satu dasar perhitungan nilai PDRB sektor industri.
- c. Upaya pemulihan ekonomi daerah melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial bagi UMKM terdampak covid 19, bantuan

alat produksi, kemudahan perizinan serta fasilitasi sertifikasi bagi produk UMKM hingga fasilitasi pemasaran dan peningkatan kapasitas pemasaran digital bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah membuahkan hasil meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan yang berdasarkan Data yang dirilis BPS Lampung Barat naik 4,46% dari tahun 2020.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut :



Gambar 3.6

Berdasarkan pada gambar 3.6 terlihat bahwa jumlah pegawai sebanyak 48 orang terdiri dari 31 orang pegawai ASN ditambah dengan 20 tenaga kontrak dan tenaga harian lepas. Adapun rincian Tenaga Kontrak dan THLS adalah sebagai berikut :

- Tenaga Kontrak PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) dari Kementerian Koperasi RI sebanyak 3 orang.
- TPL (Tenaga Penyuluh Lapangan) Bidang Industri sebanyak 4 orang
- THLS Operasional Lamban Kemasan sebanyak 6 orang



- Sebanyak 7 orang diperbantukan di masing masing Bidang. Sebelas orang tersebut sudah termasuk Petugas Kebersihan.

Tenaga kontrak dan THLS memiliki tugas membantu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam klasifikasi OPD yang tipe A yang mengurus urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dibawah naungan 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperindag mempunyai 4 Bidang, 1 Sekretariat dan UPTD PP KUKM (Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Kecil Menengah). Dengan beban kerja yang cukup banyak, diperlukannya Sumber Daya Manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Jumlah sumber daya manusia sebanyak 48 orang terdiri dari 31 orang ASN ditambah dengan 20 tenaga kontrak dan THLS. Dari 31 orang tersebut terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris, 4 orang kepala bidang, 4 orang eselon IV dan 13 orang pejabat fungsional. Seyogyanya setiap bidang memiliki minimal 5 atau 6 orang staf. Jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 73 orang, artinya Dinas Koperindag kekurangan staf sebanyak 25 orang. Akan tetapi kekurangan tersebut didukung oleh tenaga kontrak dan THLS sebanyak 20 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 5 orang pegawai.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting demi keberlangsungan sebuah Program Pembangunan. Kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat, baik jumlah waktu maupun kualitas. Faktor keberhasilan capaian kinerja di Dinas Koperindag Kabupaten Lampung Barat adalah mengutamakan kerjasama tim. Dalam pelaksanaan setiap program kegiatan di Dinas Koperindag dilaksanakan oleh sebuah tim yang telah dibentuk berdasarkan rekomendasi pimpinan. Kerjasama tim bermula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Hal ini menurut kami juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas Koperindag.



Dalam hal sarana dan prasarana, di tahun 2021 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Kabupaten Lampung Barat memiliki asset yang dirinci sebagai berikut:

a. Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan)

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup	Rusak
1	Meja Biro	6	6	0	0
2	Meja 1/2 Biro	53	53	0	0
3	Kursi Biro	4	4	0	0
4	Kursi 1/2 Biro	10	10	0	0
5	Kursi Staff Lipat	56	56	0	0
6	Faxcimile	1	1	0	0
7	Komputer	2	2	0	0
8	Komputer PC	2	2	0	0
9	Almari/rak arsip	2	2	0	0
10	Filling Cabinet	8	8	0	0
11	Brankas	2	2	0	0
12	Telepon	1	1	0	0
13	Lemari kayu	6	6	0	0
14	Kamera Digital	1	1	0	0
15	Laptop	6	5	0	0
16	Printer	5	5	0	0
17	Stavol	1	1	0	0
18	UPS	1	1	0	0
19	Meja tamu	4	4	0	0
20	LCD	2	2	0	0
21	Komputer BLUD	1	1	0	0
22	Laptop BLUD	2	2	0	0
23	Printer BLUD	2	2	0	0
24	Meja Produksi	10	10	0	0
39	Anak Timbangan kelas M2 Kap. 5 kg	2	2	0	0
40	Anak timbangan keals M2 Kap. 10 kg	2	2	0	0
41	Anak Timbangan kelas M2 Kap. 20 kg	2	2	0	0
42	Alat Uji Dacin	1	1	0	0
43	Anak Timbangan Bidur M2 Kap. 20 kg	25	25	0	0
44	Termometer digital 100'/c 0, 1'c	1	1	0	0
45	Anak Timbangan Remidi (kelas M2 Kap.1g-	1	1	0	0
46	1kg				
47	Anak Timbangan Miligram kelas M1 (1 mg- 500	1	1	0	0



48	mg)				
49	Termohyrometer	1	1	0	0
50	Dehumidifier	1	1	0	0
51	Air Cinditioner	2	2	0	0
52	Mobil Toyota Rush	1	1	0	0
53	Mobil Daihatsu Taruna	1	0	1	0
54	Toyota Kijang,	1	0	1	0
55	Mobil Isuzu Elp/Mobil Metrologi	1	0	0	0
56	Motor Honda Win	1		1	0
57	Suzuki Shogun	2		2	0
58	Suzuki RC. 100	1		1	0
59	Motor Honda Beat	1		1	0

Sumber : Laporan Barang Inventaris Diskoperindagsar Tahun 2021, Bendahara Barang

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

- 1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
 - b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel berikut :

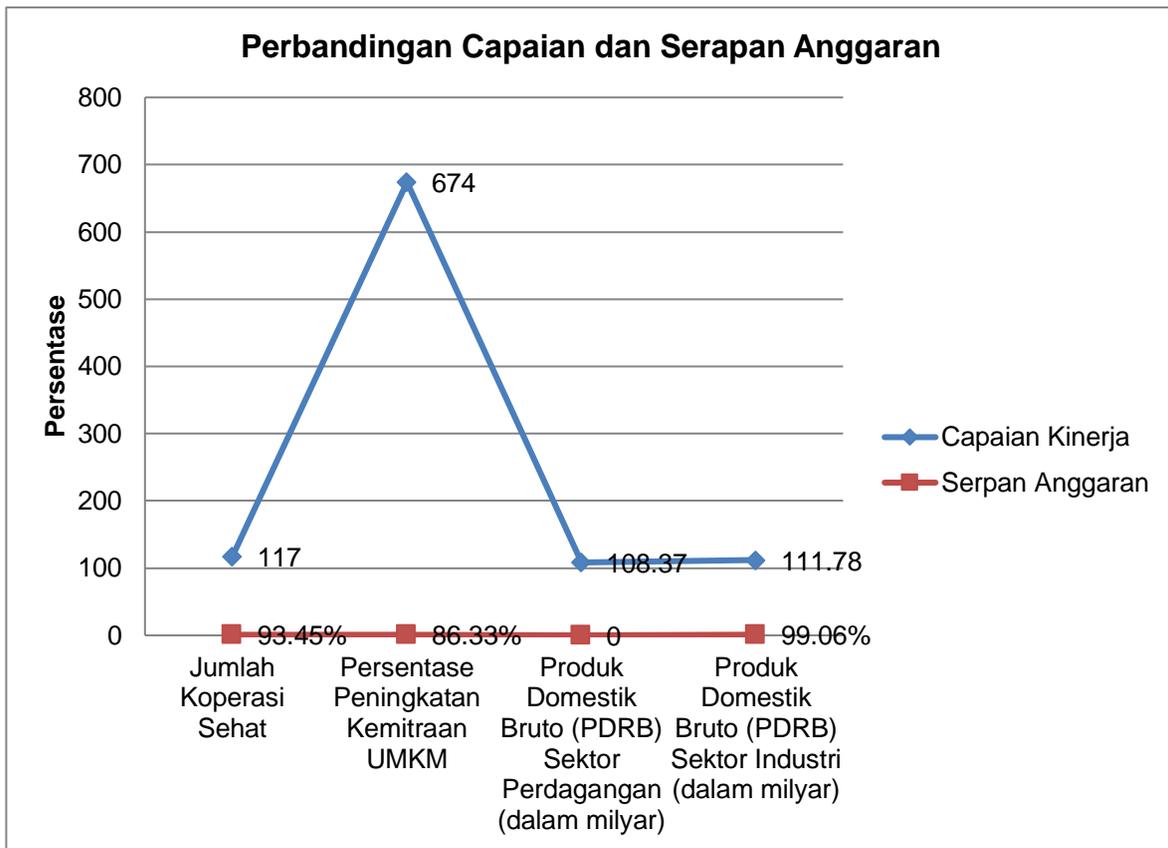
Tabel. 3.29
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi Sehat	117	93.45	6.55



	dan berdaya saing				
2	Meningkatnya Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	674	86.33	13,67
3	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam juta)	108.37	97,07	2,93
4	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam juta)	111.78	99.06	0
Jumlah Total Efisiensi					23.15%
Rata-rata efisiensi per indikator					5,78%

Berdasarkan tabel di atas, Koperindag Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, total efisiensi anggaran mencapai 23.15% dengan rata-rata per Indikator saran 5.78%. Sebagai gambar lebih jelasnya disampaikan grafis sebagai berikut :





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat serta Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 117 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 674 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 108.37 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111.78%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah optimal dalam mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, meskipun ada dua indikator yang tercapai tidak sepenuhnya yakni hanya tercapai 98%.

Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.463.919.720 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.034.862.158, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021



Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 426.781.562

Renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 108 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 465 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106.25 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 109.58 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.034.862.158 (tujuh milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat adalah 94.28 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Lampung Barat, 01 Maret 2021

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

TRI UMARYANI, SP, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19751229 199902 2 001



LAMPIRAN